

# TINDAK LANJUT LHE AKIP



## TAHUN 2024



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

Jalan R.T.A Milono Nomor 9, Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111  
www.pt-palangkaraya.go.id, ptpalangka@gmail.com

Nomor : 3467/KPT.W16-U/RA1.6/XII/2025 Palangka Raya, 29 Desember 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Dokumen  
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024

**Yth. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58  
By Pass Cempaka Putih Timur  
Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Nomor:3697/BP/PW1.1.1/IX/2025 tanggal 08 September 2025, hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya, bersama ini dengan hormat kami kirimkan matriks tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Palangkaraya. (terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.



MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

| No.                           | Rekomendasi LHE Tahun 2024   | Permasalahan   | Rencana Aksi Tindak Lanjut  | Target  | Penanggung Jawab             | Status/Progres Penyelesaian   | Keterangan   |
|-------------------------------|--|--|---|---------|------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. PERENCANAAN KINERJA</b> |  |  |   |         |                              |                               |  |
| 1                             | Agar dalam menetapkan IKU tetap mengacu pada IKU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan dibuatkan analisis terkait ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART  | Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengacu pada IKU Pengadilan Tingkat Banding yang ditetapkan Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan Nomor: 173/SEK/SK/II/2022. Keputusan tersebut memuat indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi". Akan tetapi, pencapaian target indikator ini masih tergantung pada pihak eksternal sehingga belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).   | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyusun Renstra 2025-2029 dan IKU 2025-2029 dengan mengacu kepada Renstra MA 2025-2029 dan IKU MA 2025-2029 dengan menghilangkan indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi". | 3 Bulan | Tim Penyusun Renstra dan IKU | Telah selesai ditindaklanjuti | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029. Penyusunan ini mengacu kepada Renstra dan IKU Mahkamah Agung (MA) 2025-2029. Dalam Renstra dan IKU Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2025-2029 yang ditetapkan tanggal 31 Oktober 2025 tidak lagi memuat/ mencantumkan indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi".<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1wmuu0E3NVa5ntzYkww7xEvx_iUjCo9WT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1wmuu0E3NVa5ntzYkww7xEvx_iUjCo9WT?usp=drive_link</a> |
| 2                             | Agar dalam pemenuhan kriteria berupa Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis disertai dengan analisis yang memadai dan secara komprehensif.  | Capaian indikator "Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan" selama beberapa tahun terakhir dapat dicapai dengan baik diangka lebih dari 100%. Salah satu faktor keberhasilan disebabkan oleh penetapan target yang cenderung berada di level aman. Faktor penentu lainnya adalah realisasi indikator ini sangat bergantung pada hasil survei dari pemangku kepentingan terkait, sehingga fluktuasi realisasinya sulit diprediksi. Kondisi ini yang menjadi alasan mengapa target ditetapkan pada level aman. | Telah dilakukan penyesuaian target pada Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Palangkaraya terhadap indikator "Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan".  | 3 Bulan | Tim Penyusun Renstra         | Telah selesai ditindaklanjuti | Dalam Renstra Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2025-2029 indikator "Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan" berubah nama menjadi "Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan". Target indikator tersebut pada Renstra Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2025-2029 (berikut dokumen turunannya) telah disesuaikan sehingga lebih menantang.<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/19Uqvi2caH1RIHTCHZ8o17fzEv2Dfifi?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/19Uqvi2caH1RIHTCHZ8o17fzEv2Dfifi?usp=drive_link</a>           |
| 3                             | Agar dalam penyusunan anggaran sepenuhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, khususnya pada sasaran kegiatan Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada IKU Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan. | Belum terdapat anggaran yang dialokasikan secara khusus terkait indikator "index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan" dalam rincian kertas kerja DIPA 01 maupun DIPA 03.   | Telah dilakukan penambahan detail pada rincian kertas kerja terhadap indikator "index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan" setelah konsultasi ke eselon 1 (BUA MA).   | 3 Bulan | Tim Penyusun Renstra         | Telah selesai ditindaklanjuti | Penambahan detail pada rincian kertas kerja terkait indikator "Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap Layanan Peradilan" telah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Eselon I (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-5Te0dlfdy61XO3XqczXADUgTM1WDanT?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1-5Te0dlfdy61XO3XqczXADUgTM1WDanT?usp=drive_link</a>  |
| 4                             | Agar pada target kinerja dalam Sasaran Strategis 1 IKU 5 (index persepsi stakeholder) yang merupakan penilaian atas layanan PT Palangkaraya oleh responden penerima layanan tidak perlu dilakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.    | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan perubahan IKU sebanyak dua kali. Perubahan IKU terakhir dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (SK SEKMA) Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah menetapkan Rencana Strategis 2025-2029 dengan target jangka menengah selama 5 (lima) tahun yang diharapkan tidak sering dilakukan perubahan kedepannya.  | 3 Bulan | Tim Penyusun Renstra         | Telah selesai ditindaklanjuti | Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2025-2029 telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan target jangka menengah lima tahun dan diharapkan tidak sering dilakukan peninjauan ulang (reviu).<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/19A39TdB5oXqmORfHtU1xnKGNChZIRDG?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/19A39TdB5oXqmORfHtU1xnKGNChZIRDG?usp=drive_link</a>   |
| 5                             | Agar perubahan atau revisi atas dokumen perencanaan didukung dengan penjelasan yang logis atas terjadinya perubahan tersebut, sehingga tidak terkesan hanya untuk menghasilkan capaian kinerja yang memadai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.              | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melakukan perubahan Restra sebanyak tiga kali. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menghilangkan indikator tambahan yang sudah tidak relevan dan melakukan penyesuaian target. Penyesuaian target ini didasarkan pada rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi perjanjian kinerja yang dilakukan secara triwulan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.  | Akan disusun penjelasan yang logis dan dilampirkan dalam dokumen monev atas rencana aksi perjanjian kinerja sebagai dasar jika dikemudian hari terdapat perubahan atau revisi atas dokumen perencanaan.   | 3 Bulan | Tim Penyusun Renstra         | Telah selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/13AbIEJz1b0W7cJz_CWnfnB8BjBFWe1?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/13AbIEJz1b0W7cJz_CWnfnB8BjBFWe1?usp=drive_link</a>  |



| No.   | Rekomendasi LHE Tahun 2024   | Permasalahan  | Rencana Aksi Tindak Lanjut  | Target           | Penanggung Jawab    | Status/Progres Penyelesaian   | Keterangan   |
|---|--|---|---|------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>2. PENGUKURAN KINERJA</b>                      |  |   |   |                  |                     |                               |  |
| 1   | Agar Pengukuran Kinerja sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.   | Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan, baik struktural maupun fungsional namun belum disebutkan secara eksplisit dalam dokumen Baperjakat.  | Pengukuran Kinerja (Nilai/ Predikat SKP) telah dijadikan pertimbangan pada rapat TPK/ Baperjakat Triwulan III Tahun 2025 dan disebutkan secara eksplisit dalam kolom pertimbangan hasil rapat tim, tanggal 17 September 2025 (dokumen terlampir). | 3 Bulan          | Tim Penilai Kinerja | Telah selesai ditindaklanjuti | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1w2FXCKoT_a_UOAIYgqV8mRiKU_5-DhA7usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1w2FXCKoT_a_UOAIYgqV8mRiKU_5-DhA7usp=drive_link</a>  |
| <b>3. PELAPORAN KINERJA</b>                       |  |   |   |                  |                     |                               |  |
| 1   | Agar dokumen Pernyataan Telah direviu dilengkapi dengan Laporan Hasil Reviu (LHR) yang menggambarkan pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu. | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah melaksanakan reviu atas LKJIP. Hasil reviu tersebut memuat prosedur yang telah dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Seluruh hasil reviu ini tercantum dalam notula Rapat Reviu LKJIP Tahun 2024.  | Dokumen Reviu LKJIP Tahun 2025 akan dilengkapi dengan Laporan Hasil Reviu (LHR) sebagaimana rekomendasi.  | 28 Februari 2026 | Tim Reviu LKJIP     | Dalam proses penyelesaian     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_YmS9aJPMb_Aogkls_7Rd8LpsAIBVzU?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_YmS9aJPMb_Aogkls_7Rd8LpsAIBVzU?usp=drive_link</a>  |
| <b>4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b> |  |   |   |                  |                     |                               |  |
| 1   | Agar hasil tindak lanjut atas evaluasi AKIP Pengadilan tingkat pertama yang berada di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilampirkan dan menjadi perhatian guna mendukung terjadinya peningkatan Implementasi SAKIP di seluruh satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Palangkaraya.   | Pengadilan Tingkat Pertama telah menindaklanjuti LHE AKIP setiap tahun, dan dokumen tersebut telah diunggah ke aplikasi SEMAR sehingga Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak melampirkan data tersebut untuk dikirim ke BAWAS. Pengadilan Tinggi Palangkaraya memerhatikan TLHE tersebut dan melakukan evaluasi, bersamaan dengan evaluasi AKIP Pengadilan Negeri se Kalimantan Tengah | Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah mengirimkan tindak lanjut atas evaluasi AKIP dan melampirkan dokumen tindak lanjut atas atas evaluasi AKIP Pengadilan Tingkat Pertama yang disampaikan melalui dokumen hardcopy ke BAWAS.                    | 28 Februari 2026 | Tim Evaluasi AKIP   | Dalam proses penyelesaian     | Pengiriman tindak lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pengadilan negeri se Kalimantan Tengah akan dikirimkan bersamaan dengan pengiriman dokumen AKIP PT Palangkaraya.<br><a href="https://drive.google.com/drive/folders/17bxactlYAIMf-GCn6ohZ1fg_8x76bD3K?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/17bxactlYAIMf-GCn6ohZ1fg_8x76bD3K?usp=drive_link</a> |

Palangka Raya, 29 Desember 2025

